



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 743 -Insp/2022
LAMPIRAN : 2 (DUA) LAMPIRAN

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka diperlukan adanya suatu pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksud;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja berdasarkan beban kerja yang pembagiannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Jadwal dan objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cirebon serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 743 –Insp/2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS
RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN
ANGGARAN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan skala prioritas manajemen dan audit berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan audit ke area yang memiliki risiko lebih besar akan dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan audit berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap satu audit tertentu, perencanaan kegiatan audit tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

B. Tujuan dan sasaran

Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bersinergi.

Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan program prioritas strategis pemerintah daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Reviu Laporan Kinerja;
4. Reviu Laporan Keuangan;
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
6. Pengawasan Desa;
7. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
8. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
9. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
11. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
13. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
14. Kegiatan pengawasan lainnya.

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 berdasarkan skala prioritas dan hasil analisis risiko.

Penetapan besaran risiko akan menentukan auditan yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk tim;
2. Menyusun daftar obyek pemeriksa;
3. Melakukan rekapitulasi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah;
4. Mengidentifikasi faktor risiko program dan kegiatan strategis pemerintah daerah;
5. Menentukan Skala Prioritas dalam penentuan obyek pemeriksaan;
6. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditan;
 - a) Setiap auditan ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.

- b) Besaran risiko auditan dirumuskan dengan meminta masukan dari auditan, dan jika auditan memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
 - c) Penetapan besaran risiko tiap auditan dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
7. Menentukan tingkat risiko;
 8. Menetapkan penyusunan prioritas area pengawasan, jenis pengawasan, daftar pengawasan yang wajib dilakukan (*mandatory*) instansi vertikal.

B. Pelaksanaan

1. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:

- a) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- b) Pembinaan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c) Pemberian layanan Konsultasi;

2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Meliputi beberapa aspek:

- a) Kebijakan;
- b) Kelembagaan;
- c) Tugas Pokok dan Fungsi;
- d) Pengelolaan Keuangan;
- e) Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f) Capaian Kinerja.

3. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga sehubungan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b) Penyalahgunaan wewenang;
- c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- d) Pelanggaran disiplin pegawai.

4. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan

prioritas:

- a) Reviu Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan RKA Perangkat Daerah);
- b) Reviu Laporan Keuangan;
- c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d) Reviu Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- e) Reviu Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- f) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI);
- h) Reviu Standar Satuan Harga (SSH);
- i) Reviu Analisis Standar Biaya (ASB) dan Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
- j) Reviu Harga Pokok Satuan (HPS);
- k) Reviu Unit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- l) Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN;
- m) Reviu Tata Kelola Perizinan;
- n) Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o) Reviu Akhir Masa Jabatan BUPATI;
- p) Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- q) Reviu Tata Kelola Pendapatan;
- r) Peer Reviu (Telaah Sejawat) Intern dan Ekstern.

5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a) Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b) Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP;
- c) Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah;
- d) Evaluasi Benturan Kepentingan;
- e) Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi/ *Monitoring Prevention Center (MCP)*;
- f) Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
- g) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- h) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i) Monitoring Dampak Inflasi;
- j) Penilaian Mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- k) Penilaian Mandiri Zona Integritas;
- l) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- m) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- n) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- o) Penanganan Benturan Kepentingan;
- p) Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- q) Gelar Pengawasan Daerah.

6. Kegiatan Jasa Konsultansi

Layanan Jasa Konsultansi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan saran, pelatihan dan/atau fasilitasi terhadap suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem atau subjek lainnya. Dalam konsultansi, auditor tidak dituntut untuk memberikan suatu pendapat atau penilaian independen.

Dengan layanan Konsultansi diharapkan dapat mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Early Warning System* (sistem peringatan dini) terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan sebagai upaya memperkuat Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Kegiatan Asistensi/ Pendampingan, meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, penyusunan capaian keuangan, perencanaan sistem pengendalian intern dan kegiatan asistensi lainnya.

8. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan tersebut di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Layanan Jasa Konsultansi.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).
2. Dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) wajib dilakukan reviu secara berjenjang.
3. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dianggap selesai apabila telah ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Cirebon.
4. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 743 -Insp/2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022
 TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2023

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		HP						Anggaran	Jumlah Laporan	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Ket
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	Daln	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah												Rp 178.040.000				
1	Program Pengembangan UMKM	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pertanian	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veterinier	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pertanian	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

7	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah
8	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
9	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah
10	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah
11	Program Daya Dtarik Destinasi Pariwisata	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
13	Program Penyelenggaraan Jalan	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi
14	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang
15	Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang

16	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Badan Pendapatan Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
17	Program Aplikasi Informatika	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
18	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

19	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Satuan Polisi Pamong Praja	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
20	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
21	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Kesehatan RSUD Arjawinangun RSUD Waled	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
24	Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
25	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
26	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Lingkungan Hidup	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
27	Program Pengelolaan Arsip	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kearsipan Dan Kepustakaan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
28	Program Pembinaan Perpustakaan	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Kearsipan Dan Kepustakaan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	
29	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Rendah	

30	Program Penanggulangan Bencana	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
31	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Pemadam Kebakaran	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
32	Program Pengelolaan Pendidikan	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Pendidikan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
33	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
34	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Dinas Perhubungan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
35	Program Rehabilitasi Sosial	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Sosial	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
36	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Sosial	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
37	Program Pengendalian Penduduk	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
38	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
39	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Ketenagakerjaan	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

40	Program Pendaftaran Penduduk	Audit Kinerja	Menilai Pelaksanaan prinsip efisiensi, efektif dan Ekonomis (3E)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
41	Pengelolaan Keuangan pada Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2022	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Penentuan objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan manajemen lainnya.	Mg-I November 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	3	7			Laptop, ATK	Sedang	
	Reviu Laporan Kinerja												Rp 351.150.000				
1	Reviu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Reviu	Menilai laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Mg-III Februari 2023	Mg-I Maret 2023	1	1	1	1	11	15		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Laporan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah	Mg-III Februari 2023	Mg-I Maret 2023	1	1	1	1	11	15		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
3	Reviu Rencana Kerja Anggaran (Murni dan Perubahan)	Reviu	Menilai akurasi, keandalan, dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja-K/L, Pagu Anggaran, dan kesesuaian dengan standar biaya serta kaidah kaidah penganggaran lainnya	BKAD, Bappelitbangda	Mg-III September 2023	Mg-IV September 2023	1	1	1	1	12	16		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
4	Reviu Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (Murni dan Perubahan)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Bappelitbangda	Mg-III Juni 2023	Mg-III Juni 2023	1	1	1	1	12	16		2 LHR	Laptop, ATK	Sedang	

5	Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) (Murni dan Perubahan)	Reviu	Menilai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa KUA-PPAS telah disusun berdasarkan RKPD atas kesesuaian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung rancangan PPAS, kesesuaian pencantuman indikator dan target kinerja serta pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran dalam rencana program dan kegiatan dalam rancangan PPAS dengan RKPD, dan kesesuaian plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja dalam rancangan PPAS dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 serta Rancangan KUA Daerah TA 2023	BKAD, Bappelitbangda	Mg-II Juli 2023	Mg-II Juli 2023	1	1	1	1	3	7		2 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
6	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Reviu	Memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan	BKAD	Mg-III Januari 2023	Mg-III Januari 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
7	Reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	UKPBJ Sekretariat Daerah	Mg-III Januari 2023	Mg-III Januari 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Tinggi	
8	Reviu Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)/ Manajemen ASN	Reviu	Menilai pengelolaan SDM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	BKPSDM	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	Mengikuti Jadwal Rotasi/ Mutasi/ Promosi Tahun 2023	1	1	1	1	5	9			Laptop, ATK	Sedang	
9	Reviu Tata Kelola Perizinan	Reviu	Menilai perizinan dan non perizinan telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku	DPMPSTP	Mg-II Maret 2023	Mg-II Maret 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	

10	Reviu Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Reviu	Menilai pelaksanaan penerapan dan capaian SPM pada perangkat daerah pengampu	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPKPP, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Damkar	Mg-III Desember 2023	Mg-III Desember 2023	1	1	1	1	6	10		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
11	Reviu Akhir Masa Jabatan BUPATI	Reviu	Mengevaluasi capaian RPJM daerah serta memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati pada saat berakhir dari jabatannya	Kinerja Bupati dan Wakil Bupati	Mg-I Desember 2023	Mg-I Desember 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
12	Reviu Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Reviu	Mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG	Seluruh Perangkat Daerah	Mg- I April 2023	Mg- II April 2023	1	1	1	1	4	8		1 LHR	Laptop, ATK	Rendah	
13	Reviu Tata Kelola Pendapatan	Reviu	Menilai optimalisasi pendapatan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Badan Pendapatan Daerah	Mg-II Maret 2023	Mg-II Maret 2023	1	1	1	1	3	7		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
14	Peer Reviu (Telaah Sejawat) Intern dan Ekstern	Reviu	Menilai organisasi audit yang di review telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku	Ditentukan kemudian hari	Mg-IV Maret 2023	Mg-IV Maret 2023	1	1	1	1	7	11		1 Laporan	Laptop, ATK	Rendah	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah												Rp 220.560.000				
1	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Ketaatan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	SMPN yang dipilih menjadi objek pemeriksaan (2 Tim setiap Irban)	Mg-I Februari 2023	Mg-II Maret 2023									Laptop, ATK	Sedang	
				1. SMPN 1 Gegesik 2. SMPN 1 Panguragan 3. SMPN 1 Kaliwedi 4. SMPN 2 Klangeran 5. SMPN 1 Pabedilan 6. SMPN 1 Pabuaran			1	1	1	1	2	6		6 LHP			

				1. SMPN 1 Ciwaringin 2. SMPN 1 Ciledug 3. SMPN 1 Astanajapura 4. SMPN 1 Kedawung 5. SMPN 1 Lemahabang 6. SMPN 2 Plered			1	1	1	1	2	6		6 LHP			
				1. SMPN 1 Dukupuntang 2. SMPN 1 Beber 3. SMPN 2 Gunungjati 4. SMPN 1 Kapetakan 5. SMPN 1 Mundu 6. SMPN 1 Suranenggala			1	1	1	1	2	6		6 LHP			
				1. SMPN 1 Arjawinangun 2. SMPN 2 Babakan 3. SMPN 1 Depok 4. SMPN 2 Jamblang 5. SMPN 2 Karangsembung 6. SMPN 2 Palimanan			1	1	1	1	2	6		6 LHP			
2	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022 pada Sekolah Dasar Negeri (SDN)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	SDN yang dipilih menjadi objek pemeriksaan (2 Tim setiap Irban)	Mg-I Februari 2023	Mg-II Maret 2023										Laptop, ATK	Sedang
				Kecamatan Gesesik: 1. SDN 1 Gesesik Kidul			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Weru: 1. SDN 1 Kertasari			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Plumbon: 1. SDN 1 Bodesari			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Klangean: 1. SDN 1 Bangodua			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Pabedilan: 1. SDN 1 Babakan Sari Lor			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Panguragan: 1. SDN 1 Gujeg			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Astanajapura: 1. SDN 1 Japura Kidul			1	1	1	1	2	6		1 LHP			

				Kecamatan Ciledug: 1. SDN 1 Bojong Negara			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Lemahabang: 1. SDN 1 Lemahabang			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Plered: 1. SDN 1 Cangkring			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Susukan: 1. SDN 1 Jatianom			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Gebang: 1. Desa Dompjong Kulon			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Sumber: 1. SDN 1 Kaliwadas			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Dukupuntang: 1. SDN 1 Balad			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Waled: 1. SDN 1 Ambit			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Gunungjati: 1. SDN 1 Babadan			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Kapetakan: 1. SDN 1 Bungko Lor			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Mundu: 1. SDN 1 Bandengan			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Losari: 1. SDN 1 Ambulu			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Arjawinangun: 1. SDN 1 Bulak			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Babakan: 1. SDN 1 Babakan			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Depok: 1. SDN 1 Cikeduk			1	1	1	1	2	6		1 LHP			

				Kecamatan Palimanan: 1. SDN 1 Balerante			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Jamblang: 1. SDN 1 Bakung Lor			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
3	Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2022 pada instansi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	PAUD/PKBM yang dipilih menjadi objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari (24 obrik)	Mg-I Februari 2023	Mg-II Maret 2023	1	1	1	1	2	6		24 LHP	Laptop, ATK	Sedang	

	Reviu Laporan Keuangan												Rp 171.250.000				
1	Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Reviu	Menilai Kesesuaian LKPD terhadap SAP dan Peraturan Lain	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-III Februari 2023	Mg-II Maret 2023	1	1	1	1	11	15		33 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Analisa Standar Belanja (ASB)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I Juni 2023	Mg-I Juni 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
3	Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I Juni 2023	Mg-I Juni 2023	1	1	1	1	5	9		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
4	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) 3 Tahap	Reviu	Menilai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I Maret, Juli, dan Oktober 2023	Mg-I Maret, Juli, dan Oktober 2023	1	1	1	1	6	10		3 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
5	Reviu Standar Satuan Harga (SSH)	Reviu	Menilai penyusunan dokumen telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mg-I Juni 2023	Mg-I Juni 2023	1	1	1	1	6	10		1 LHR	Laptop, ATK	Sedang	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												Rp 759.417.800				
1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Evaluasi dan Monitoring	Menilai pelaksanaan tindak lanjut telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Perangkat Daerah yang terkait			1	1	1	1	3	7			Laptop, ATK	Tinggi	

	Pengawasan Desa													Rp 559.692.400				
1	Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun Anggaran 2022	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Desa yang melangsungkan Pemilihan Kuwu pada tahun 2023 (Tim mengikuti Wilayah Irbn)	Mg-II Mei 2023	Mg-II Juni 2023										Laptop, ATK	Tinggi	
				Kecamatan Pabuaran: 1. Desa Pabuaran Lor			1	1	1	1	2	6		1 LHP				
				Kecamatan Weru: 1. Desa Karang Sari 2. Desa Setu Wetan 3. Desa Tegalwangi			1	1	1	1	2	6		3 LHP				
				Kecamatan Klagenan: 1. Desa Serang 2. Desa Slangit			1	1	1	1	2	6		2 LHP				
				Kecamatan Kaliwedi: 1. Desa Guwa Kidul 2. Desa Wargabinangun 3. Desa Kaliwedi Lor			1	1	1	1	2	6		3 LHP				
				Kecamatan Pangenan: 1. Desa Bendungan 2. Desa Japura Lor			1	1	1	1	2	6		2 LHP				
				Kecamatan Panguragan: 1. Desa Kalianyar 2. Desa Panguragan 3. Desa Gujeg			1	1	1	1	2	6		3 LHP				
				Kecamatan Karang Wareng: 1. Desa Karang Wareng 2. Desa Karangasem			1	1	1	1	2	6		2 LHP				
				Kecamatan Pabedilan: 1. Desa Kalibuntu 2. Desa Kalimukti 3. Desa Babakan Losari 4. Desa Babakan Losari Lor 5. Desa Pabedilan Wetan 6. Desa Tersana 7. Desa Pasuruan 8. Desa Dukuhwidara			1	1	1	1	2	6		8 LHP				

				Kecamatan Gegecik: 1. Desa Jagapura Lor 2. Desa Kedungdalem 3. Desa Bayalangu Lor			1	1	1	1	2	6		3 LHP			
				Kecamatan Plumbon: 1. Desa Pamijahan 2. Desa Kedungsana			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Pasaleman: 1. Desa Cigobang			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Kedawung: 1. Desa Kedungjaya 2. Desa Kedungdawa			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Ciwaringin: 1. Desa Gintung Kidul 2. Desa Galagamba			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Ciledug: 1. Desa Jatiseeng			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Plered: 1. Desa Panembahan 2. Desa Wotgali 3. Desa Gamel 4. Desa Cangkring			1	1	1	1	2	6		4 LHP			
				Kecamatan Talun: 1. Desa Cirebon Girang 2. Desa Wanasaba Lor			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Astanajapura: 1. Desa Mertapada Wetan 2. Desa Astanajapura 3. Desa Japura Kidul 4. Desa Cangkuang			1	1	1	1	2	6		4 LHP			
				Kecamatan Susukan: 1. Desa Ujunggebang 2. Desa Jatianom			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Gebang: 1. Desa Gebang Ilir 2. Desa Gebang Mekar 3. Desa Melakasari			1	1	1	1	2	6		3 LHP			

				Kecamatan Lemahabang: 1. Desa Wangkelang 2. Desa Lemahabang			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Suranenggala: 1. Desa Purwawinangun 2. Desa Suranenggala			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Kapetakan: 1. Desa Pegagan Lor 2. Desa Kapetakan			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Beber: 1. Desa Kondangsari			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Waled: 1. Desa Waled Kota 2. Desa Ambit 3. Desa Gunungsari 4. Desa Karangsari 5. Desa Cibogo 6. Desa Cisaat 7. Desa Cikulak 8. Desa Cikulak Kidul			1	1	1	1	2	6		8 LHP			
				Kecamatan Mundu: 1. Desa Setupatok 2. Desa Suci			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Gunungjati: 1. Desa Grogol			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Susukan Lebak: 1. Desa Curug 2. Desa Kaligawe Wetan 3. Desa Kaligawe 4. Desa Wilulang			1	1	1	1	2	6		4 LHP			
				Kecamatan Dukupuntang: 1. Desa Sindangjawa 2. Desa Kepunduan 3. Desa Dukupuntang 4. Desa Balad			1	1	1	1	2	6		4 LHP			
				Kecamatan Sumber: 1. Desa Sidawangi			1	1	1	1	2	6		1 LHP			

				Kecamatan Gempol: 1. Desa Cikeusal 2. Desa Cupang			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Karangsembung: 1. Desa Karangsuwung 2. Desa Kubangkarang			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Tengah Tani: 1. Desa Kalitengah			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Jamblang: 1. Desa Bakung Lor			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Losari: 1. Desa Barisan 2. Desa Losari Kidul 3. Desa Losari Lor 4. Desa Kalisari 5. Desa Ambulu 6. Desa Tawang Sari			1	1	1	1	2	6		6 LHP			
				Kecamatan Greged: 1. Desa Lebak Mekar 2. Desa Kamarang			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Sedong: 1. Desa Sedong Kidul			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Arjawinangun: 1. Desa Kebonturi			1	1	1	1	2	6		1 LHP			
				Kecamatan Palimanan: 1. Desa Balerante 2. Desa Lungbenda			1	1	1	1	2	6		2 LHP			
				Kecamatan Depok: 1. Desa Warugede 2. Desa Kasugengan Kidul			1	1	1	1	2	6		2 LHP			

				Kecamatan Babakan: 1. Desa Canguang 2. Desa Babakan Gebang 3. Desa Karangwangun 4. Desa Sumber Lor			1	1	1	1	2	6		4 LHP			
2	Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 melalui Sistem Keuangan Desa	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menitikberatkan pada pengujian SPI, pengujian substantif, dan penilaian atas kinerja pengelolaan keuangan desa	Penentuan objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan manajemen lainnya.	Mg-II Mei 2023	Mg-II Juni 2023	1	1	1	1	2	6			Laptop, ATK	Sedang	
3	Pengelolaan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2022	Audit Kinerja	Memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada BUMDES telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penentuan objek pemeriksaan ditentukan kemudian hari berdasarkan hasil penilaian risiko dan pertimbangan manajemen lainnya.	Mg-II Mei 2023	Mg-II Juni 2023	1	1	1	1	2	6			Laptop, ATK	Tinggi	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah												Rp 212.043.200				
1	Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan	Audit Investigasi	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Perangkat Daerah yang terkait			1	1	1	1	2	6			Laptop, ATK	Tinggi	

	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu												Rp 1.079.126.000				
1	Pemeriksaan Khusus pada Desa/Kelurahan/Perangkat Daerah	Audit Investigasi	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Perangkat Daerah yang terkait			1	1	1	1	2	6			Laptop, ATK	Tinggi	
2	Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Audit Tujuan Tertentu	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Perangkat Daerah yang belum dilakukan pemeriksaan pada tahun 2022	Mg-II Januari 2023	Mg-III Januari 2023	1	1	1	1	3	7			Laptop, ATK	Sedang	
3	Audit Kepegawaian	Audit Tujuan Tertentu	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Perangkat Daerah yang terkait			1	1	1	1	3	7			Laptop, ATK	Sedang	
4	Audit Vaksinasi Covid-19	Audit Tujuan Tertentu	Menilai penerapan sistem pelaporan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran sampai pada penjatuhan hukuman berjalan secara efektif	Dinas Kesehatan	Mengikuti instruksi dari Kemenkes	Mengikuti instruksi dari Kemenkes	1	1	1	1	3	7		1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
5	Kegiatan Belanja Makan dan Minum	Audit Tujuan Tertentu	Menilai Pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sasaran yang ditetapkan	Sekolah Dasar Negeri yang ditentukan kemudian hari (40 Korwil)	Mg-IV Januari 2023	Mg-I Februari 2023	1	1	1	1	2	6			Laptop, ATK	Tinggi	

6	Probit Audit	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran dan memenuhi ketentuan	Perangkat Daerah yang menjadi sample (5 Proyek Strategis dibentuk 5 Tim)			1	1	1	1	3	7		5 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
7	Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Audit Tujuan Tertentu (Audit Ketaatan)	Menilai ketaatan/ Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Perkreditan Rakyat (BPR)	Mg-I April 2023	Mg-II April 2023	1	1	1	1	3	7		2 LHP	Laptop, ATK	Sedang	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan												Rp 223.581.800				
1	Pendampingan Perangkat Daerah/ Jasa Konsultansi	Evaluasi dan Monitoring	Memperluas peran APIP dengan memberikan rekomendasi yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi di masa mendatang	Perangkat Daerah yang terkait											Laptop, ATK	Sedang	
2	Gelar Pengawasan Daerah	Evaluasi dan Monitoring	Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta evaluasi terhadap hasil pengawasan yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-II Desember 2023	Mg-II Desember 2023								1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Pendampingan Inspektorat Provinsi/ Instansi Pembina APIP	Evaluasi dan Monitoring	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Inspektorat											Laptop, ATK	Sedang	

1	Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Kabupaten dan Pusat oleh BPKP	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada tingkatan instansi maupun tingkatan kegiatan untuk sasaran operasional, ketaatan dan pengamanan aset	Seluruh Perangkat Daerah			1	1	1	1	33	37			Laptop, ATK	Sedang	
2	Evaluasi Penjaminan Kualitas SPIP	Evaluasi dan Monitoring	Menilai proses penjaminan kualitas terhadap penilaian mandiri yang dilakukan perangkat daerah atas tingkat maturitas/ kematangan implementasi SPIP	Tim Penjaminan Kualitas SPIP											Laptop, ATK	Sedang	
3	Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah	Evaluasi dan Monitoring	Menilai pengelolaan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan	Seluruh Perangkat Daerah	Mg-II Juni, September dan Desember 2023	Mg-II Juni, September dan Desember 2023	1	1	1	1	2	6		3 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	
4	Evaluasi Benturan Kepentingan	Evaluasi dan Monitoring	Mengevaluasi pengelolaan penanganan benturan kepentingan baik dari pihak internal maupun eksternal pada instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Mg-II Oktober 2023	Mg-II Oktober 2023	1	1	1	1	3	7		1 Laporan	Laptop, ATK	Rendah	
5	Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi/ <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP)	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan pemantauan atas komitmen instansi pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui rencana aksi yang disusun	Seluruh Perangkat Daerah											Laptop, ATK	Sedang	
6	Monitoring Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Evaluasi/ Reviu/ Monitoring	Memperoleh <i>update</i> kebijakan pemerintah daerah terkait P3DN, nilai komitmen pengadaan produk dalam negeri yang direncanakan, serta realisasi belanja produk dalam negeri dalam PBJ	Seluruh Perangkat Daerah	Monitoring mingguan, Evaluasi bulanan, Reviu Triwulan	Monitoring mingguan, Evaluasi bulanan, Reviu Triwulan	1	1	1	1	5	9			Laptop, ATK	Sedang	

7	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan verifikasi atas pengisian LHKPN yang dilakukan oleh para PN/WL telah sesuai dengan data yang seharusnya	Seluruh PN/WL	Januari 2023	Maret 2023									Laptop, ATK	Sedang	
8	Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Evaluasi dan Monitoring	Melakukan verifikasi atas pengisian LHKASN yang dilakukan oleh para PN/WL telah sesuai dengan data yang seharusnya	Seluruh PN/WL	Januari 2023	Maret 2023									Laptop, ATK	Sedang	
9	Monitoring Dampak Inflasi	Monitoring	Memastikan bahwa dampak inflasi yang terjadi masih berada pada batas kewajaran, menelaah penyebab dan penanganan yang dapat dilakukan	Pemerintah Daerah			1	1	1	1	4	8			Laptop, ATK	Sedang	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												Rp 497.861.800				
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan perannya	Pegawai Inspektorat											Laptop, ATK	Sedang	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												Rp 16.272.000				
1	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Reviu	Menilai secara keseluruhan kinerja terkait kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah	Perangkat Daerah yang terkait	Mg-IV Agustus 2023	Mg-I September 2023	1	1	1	1	12	16		1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	
2	Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	Reviu	Menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan instansi	Perangkat Daerah yang terkait	Mg-I September 2023	Mg-II September 2023	1	1	1	1	12	16		1 Laporan	Laptop, ATK	Sedang	

Pengawasan Lainnya																			
1	Sosialisasi Anti Korupsi/ Layanan Pengaduan/ Penanganan Gratifikasi	Sosialisasi	Memperluas peran APIP dengan memberikan rekomendasi yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi di masa mendatang	Seluruh Perangkat Daerah														Laptop, ATK	Sedang

Keterangan:  Tentatif

